

Timurnesia: Rekonstruksi Identitas Kolektif dan Kedaulatan Kreatif dalam Rimba Algoritmik Musik Indonesia Timur

Muhammad Ilham Mustain
Murda ^{1*}

Zandry Aldrin ²

¹ Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Jayapura, Indonesia.

² Deputi Ekosistem Kreatif dan Pembangunan Perkotaan, Indonesia Creative Cities Network, Jakarta, Indonesia.

*email: lammurda1985@gmail.com

Kata Kunci

Timurnesia,
Musik Indonesia Timur,
Autoetnografi,
Kedaulatan Kreatif,
Resiliensi Digital.

Keywords:

Timurnesia,
Eastern Indonesian Music,
Autoethnography,
Creative Sovereignty,
Digital Resilience.

Received: May 2026

Accepted: June 2026

Published: June 2026

Abstrak

Meningkatnya perhatian publik terhadap musik Indonesia Timur di ruang digital belum sepenuhnya diikuti pengakuan setara dalam kebijakan, distribusi, dan industri musik nasional. Penelitian ini menganalisis Timurnesia sebagai rekonstruksi identitas kolektif dan strategi awal penguatan kedaulatan kreatif musik Indonesia Timur di tengah sentralisasi industri serta dominasi platform digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode autoetnografi reflektif. Data utama berasal dari catatan lapangan penulis sebagai peserta Focus Group Discussion "Peta Jalan Ekosistem Musik Indonesia Timur dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional" yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan RI pada 27 Januari 2026. Data diperkuat melalui dokumen forum, memo reflektif, media, dan jejak digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timurnesia tidak sekadar penamaan genre, tetapi wadah komunitas dan kerangka konsolidasi pelaku musik Indonesia Timur. Penelitian menyimpulkan bahwa Timurnesia masih berada pada tahap awal institusionalisasi, tetapi berpotensi memperkuat identitas kawasan, resiliensi digital, dan diplomasi budaya berbasis komunitas.

Abstract

The increasing public attention to Eastern Indonesian music in the digital space has not been fully followed by equal recognition in national music policy, distribution, and industry. This study analyzes Timurnesia as a reconstruction of collective identity and an initial strategy for strengthening the creative richness of Eastern Indonesian music amidst industry centralization and the dominance of digital platforms. The study uses a qualitative approach with a reflective autoethnography method. The primary data comes from the author's field notes as a participant in the Focus Group Discussion "Roadmap for the Eastern Indonesian Music Ecosystem in National Cultural Policy" held by the Indonesian Ministry of Culture on January 27, 2026. Data are strengthened through forum documents, reflective memos, media, and digital traces. The results of the study indicate that Timurnesia is not simply a genre name, but a community forum and framework that consolidates Eastern Indonesian music practitioners. The study concludes that Timurnesia is still in the early stages of institutionalization, but has the potential to strengthen regional identity, digital resilience, and community-based cultural diplomacy.



© 2026 Murda, Aldrin. Published by Faculty of Languages and Arts - Universitas Negeri Medan. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
DOI: <https://doi.org/10.24114/grenek.v15i1.72516>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara musik diproduksi, diedarkan, didengar, dan dimaknai. Platform streaming, media sosial, playlist digital, dan sistem rekomendasi berbasis algoritma memberi peluang baru bagi musisi untuk menjangkau pendengar tanpa sepenuhnya bergantung pada pusat industri. Namun, peluang itu tidak selalu berjalan bersama dengan keadilan akses. Di balik janji keterbukaan digital, ada sistem kurasi, metrik keterlibatan, promosi platform, dan logika algoritmik yang ikut menentukan karya mana yang mudah terlihat dan mana yang tetap berada di pinggir (Bonini & Gandini, 2019; Morris, 2020; Prey, 2018, 2020). Karena itu, ruang digital tidak dapat dibaca hanya sebagai ruang bebas. Ia juga menjadi arena baru tempat kuasa industri, teknologi, dan budaya bertemu.

Dalam konteks musik, platform digital sering membuat karya tampak lebih mudah beredar, tetapi tidak selalu membuat posisi musisi menjadi lebih kuat. Sistem playlist, rekomendasi otomatis, dan distribusi berbasis data dapat membuka akses bagi karya-karya dari daerah, tetapi juga menciptakan ketergantungan baru pada logika platform (Aguiar & Waldfogel, 2021; Siles et al., 2020). Musisi dituntut untuk bukan hanya mencipta lagu, tetapi juga memahami ritme konten, algoritma, branding digital, engagement, dan cara kerja pasar yang semakin cepat. Di titik ini, persoalan musik tidak lagi sebatas estetika atau produksi bunyi, tetapi juga menyangkut distribusi kuasa, kendali ekonomi, dan kemampuan komunitas mengatur masa depan ekosistemnya sendiri (Hesmondhalgh, 2021; Hesmondhalgh & Meier, 2018).

Kondisi tersebut terasa penting ketika dibaca dari posisi musik Indonesia Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, musik dari kawasan Timur semakin sering hadir dalam percakapan publik, terutama melalui media sosial, platform streaming, dan video pendek. Lagu, ritme, bahasa, gaya vokal, serta bentuk kolaborasi anak muda dari kawasan Timur semakin dikenal oleh pendengar nasional. Akan tetapi, keterlihatan digital belum selalu berarti pengakuan yang setara. Musik Indonesia Timur masih sering muncul sebagai fenomena viral, warna lokal, atau representasi daerah yang menarik perhatian sesaat, sementara infrastruktur yang menopang keberlanjutan pelakunya belum selalu kuat. Kajian tentang platformisasi musik di Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola musik digital masih menyimpan persoalan distribusi, posisi musisi lokal, dan relasi kuasa antara pelaku independen dengan sistem platform (Resmadi, 2024; Resmadi & Baulch, 2024).

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena Indonesia Timur bukan sekadar wilayah geografis. Ia adalah ruang kultural yang luas, dengan sejarah, bahasa, ritme, tubuh, migrasi, agama, dan pengalaman sosial yang berlapis. Musik dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan berbagai jejaring diaspora Timur tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari tradisi lisan, pesta, ritus, kerja kolektif, kehidupan pesisir, pengalaman merantau, dan perjumpaan antarkomunitas. Karena itu, musik Indonesia Timur tidak cukup dipahami sebagai komoditas hiburan. Ia juga menjadi cara komunitas menyimpan ingatan, membangun kedekatan, menegosiasikan identitas, dan menyatakan keberadaan diri. Dalam kajian identitas musikal, musik sering berperan penting dalam pembentukan identitas etnik, diaspora, dan rasa memiliki terhadap suatu ruang sosial (Lidskog, 2016).

Di tengah situasi itulah istilah Timurnesia menjadi penting untuk dibaca. Dalam artikel ini, Timurnesia tidak diposisikan semata-mata sebagai genre musik baru dalam arti industri yang sempit. Secara operasional, Timurnesia dipahami sebagai wadah, ruang bersama, dan komunitas kultural yang berusaha merangkum keragaman ekspresi musik Indonesia Timur. Ia tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan musik dari berbagai wilayah Timur, tetapi untuk memberi ruang konsolidasi agar keragaman itu dapat dikenali, dibicarakan, dikurasi, dan diperjuangkan secara lebih setara. Dengan pengertian ini, Timurnesia lebih dekat pada proses pembentukan identitas kolektif daripada sekadar label pasar.

Penegasan ini penting karena dalam ruang media, Timurnesia sering kali mudah disederhanakan sebagai "genre baru". Penyebutan itu tidak sepenuhnya keliru dalam konteks komunikasi publik, tetapi belum cukup menangkap kompleksitas gagasan yang muncul di lapangan. Berdasarkan catatan lapangan penulis sebagai peserta Focus Group Discussion "Peta Jalan Ekosistem Musik Indonesia Timur dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional" yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan RI pada 27 Januari 2026, Timurnesia dibicarakan sebagai ruang bersama bagi musik Indonesia Timur. Dalam forum tersebut, istilah Timurnesia diusulkan oleh Silet Open Up, pencipta lagu "Tabola Bale", dalam proses bertukar pikiran bersama Kementerian Kebudayaan RI. Usulan itu tidak hanya menyangkut nama, tetapi juga kebutuhan akan tempat, wadah, dan komunitas yang dapat menampung energi kreatif musik Indonesia Timur.

Forum tersebut juga menunjukkan bahwa Timurnesia tidak lahir hanya dari dorongan komunitas, tetapi dari pertemuan antara aspirasi pelaku musik dan respons kebijakan kebudayaan. Dalam catatan lapangan penulis, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menanggapi fenomena musik Indonesia Timur, termasuk lagu "Tabola Bale", sebagai perkembangan yang patut diapresiasi. Ia juga menegaskan kesiapan Kementerian Kebudayaan untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan ekosistem musik serta objek pemajuan kebudayaan lainnya. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa Timurnesia mulai bergerak dari percakapan komunitas menuju ruang kebijakan. Dengan demikian, Timurnesia dapat dibaca sebagai titik temu antara kebutuhan representasi, penguatan ekosistem, dan fasilitasi negara.

Dalam artikel ini, istilah "rimba algoritmik" digunakan untuk menjelaskan medan digital yang harus dihadapi oleh musik Indonesia Timur. Rimba algoritmik merujuk pada situasi ketika karya musik beredar dalam sistem yang dikendalikan oleh rekomendasi algoritmik, playlist, metrik konsumsi, viralitas, dan logika platform. Di satu sisi, medan ini memberi peluang agar musik dari wilayah yang sebelumnya kurang terlihat dapat menjangkau pendengar luas. Di sisi lain, medan yang sama dapat membuat karya cepat muncul, cepat dikonsumsi, lalu cepat dilupakan. Di sini, persoalan utama bukan hanya bagaimana musik Timur menjadi

viral, tetapi bagaimana viralitas itu dapat diubah menjadi ekosistem yang lebih berkelanjutan. Kajian tentang platform musik menunjukkan bahwa algoritma dan sistem rekomendasi tidak pernah netral karena ikut membentuk cara karya ditemukan, dinilai, dan dikonsumsi (Dinnissen & Bauer, 2022, 2023; Werner, 2020).

Karena itu, pembacaan terhadap Timurnesia perlu dikaitkan dengan kedaulatan kreatif. Kedaulatan kreatif dalam artikel ini dipahami sebagai kemampuan pelaku musik Indonesia Timur untuk mengelola narasi, produksi, distribusi, monetisasi, arsip, hak cipta, dan arah perkembangan ekosistemnya sendiri. Dengan kata lain, kedaulatan kreatif tidak cukup diukur dari jumlah penonton, pendengar, atau viralitas sebuah lagu. Ia harus dilihat dari sejauh mana komunitas musik memiliki kendali atas nilai budaya dan ekonomi dari karya yang mereka hasilkan. Persoalan keadilan platform, posisi musisi, dan distribusi manfaat dalam ekosistem streaming menjadi isu penting dalam pembahasan ini (Dinnissen & Bauer, 2022; Ferraro et al., 2021; Vonderau, 2019).

Dari sisi teoritis, artikel ini menghubungkan Timurnesia dengan tiga gagasan utama: identitas berbasis tempat, cultural branding, dan kedaulatan kreatif. Identitas berbasis tempat membantu menjelaskan bahwa Indonesia Timur bukan hanya lokasi geografis, tetapi ruang makna yang dibentuk oleh sejarah, pengalaman, simbol, bunyi, dan praktik kebudayaan. Cultural branding memberi perangkat untuk membaca bagaimana sebuah nama atau tanda budaya dapat bekerja dalam memperkuat pengenalan publik terhadap suatu wilayah, tanpa harus memutusnyanya dari komunitas asalnya. Sementara itu, kedaulatan kreatif memberi arah agar penjenamaan tidak berhenti sebagai strategi promosi, tetapi bergerak menjadi upaya penguatan posisi tawar pelaku budaya. Hubungan antara tempat, identitas, dan penjenamaan budaya dalam industri musik dapat dibaca melalui kajian place branding dan place-based intangibles yang menempatkan musik sebagai sumber nilai kawasan (Adler, 2024; Castaldi & Mendonça, 2024; de Jong & Lu, 2022).

Selain itu, penguatan Timurnesia juga membutuhkan pendekatan ekosistem. Musik Indonesia Timur tidak mungkin diperkuat hanya oleh musisi, atau hanya oleh negara. Ia membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku industri, dan media. Dalam kerangka Pentahelix, masing-masing aktor memiliki peran yang saling melengkapi: pemerintah membuka ruang kebijakan dan fasilitas; komunitas menjaga energi kreatif; akademisi membantu riset dan dokumentasi; pelaku industri mengembangkan produksi, distribusi, dan monetisasi; sedangkan media memperluas narasi publik. Kajian tentang Pentahelix menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor menjadi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem berbasis lokal (Atmojo et al., 2023; Prajanti et al., 2023; Sudiana et al., 2020; Sukarno et al., 2020).

Meski begitu, Timurnesia tidak boleh dibaca terlalu cepat sebagai solusi final. Sebagai gagasan yang masih muda, ia menyimpan potensi sekaligus risiko. Potensinya terletak pada kemampuan memberi nama pada aspirasi yang selama ini tersebar: keinginan agar musik Indonesia Timur tidak hanya hadir sebagai fenomena viral, tetapi juga diakui sebagai ekosistem budaya yang layak difasilitasi. Risikonya, Timurnesia dapat berhenti sebagai slogan, label media, atau komoditas simbolik jika tidak diikuti oleh program yang nyata. Ia juga dapat mengalami penyederhanaan makna ketika masuk ke ruang industri atau media. Karena itu, artikel ini menempatkan Timurnesia sebagai proses yang sedang dibentuk dan dinegosiasikan, bukan sebagai identitas yang sudah selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana Timurnesia dibentuk dan dipahami sebagai wadah, ruang bersama, dan komunitas kultural musik Indonesia Timur? Kedua, bagaimana Timurnesia bekerja sebagai rekonstruksi identitas kolektif dan strategi awal penguatan kedaulatan kreatif di tengah sentralisasi industri dan dominasi platform digital? Ketiga, bagaimana keterlibatan aktor lintas sektor dalam FGD menunjukkan peluang sekaligus tantangan penguatan ekosistem musik Indonesia Timur?

Penelitian ini bertujuan menganalisis Timurnesia sebagai proses rekonstruksi identitas kolektif dan strategi awal penguatan kedaulatan kreatif musik Indonesia Timur. Dengan menggunakan autoetnografi reflektif, artikel ini berangkat dari catatan lapangan penulis sebagai peserta FGD, lalu membacanya bersama dokumen resmi, memo reflektif, data media daring, dan jejak digital sebagai korpus pendukung. Dengan cara ini, artikel ini berusaha menjaga keseimbangan antara pengalaman lapangan, pembacaan teoritis, dan kesadaran kritis terhadap posisi penulis.

Kontribusi artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, secara akademik, artikel ini menawarkan pembacaan awal tentang Timurnesia sebagai identitas kolektif yang dibangun melalui pertemuan antara komunitas musik, kebijakan kebudayaan, dan platform digital. Kedua, secara praktis, artikel ini menunjukkan bahwa penguatan musik Indonesia Timur tidak cukup dilakukan melalui viralitas atau penamaan, tetapi membutuhkan ekosistem yang menyentuh distribusi, kurasi, hak cipta, pengarsipan, pengembangan talenta, dukungan kebijakan, dan jejaring pertunjukan. Di tengah rimba algoritmik yang terus mengubah cara musik

ditemukan dan dikonsumsi, Timurnesia membuka kemungkinan untuk membaca musik Indonesia Timur bukan hanya sebagai bunyi yang ramai, tetapi sebagai kekuatan budaya yang sedang mencari ruang setara dalam kebudayaan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain autoetnografi reflektif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berangkat dari kebutuhan mengukur gejala secara statistik, tetapi untuk memahami proses pembentukan makna, negosiasi identitas, dan relasi antaraktor dalam kemunculan Timurnesia. Dalam penelitian kualitatif, pengalaman, konteks, dan posisi sosial peneliti dapat menjadi bagian penting dari cara memahami suatu peristiwa, terutama ketika peristiwa tersebut sedang berlangsung dan belum sepenuhnya mapan sebagai objek kajian. Autoetnografi digunakan karena memberi ruang bagi penulis untuk membaca pengalaman langsungnya sebagai peserta forum, bukan sekadar sebagai pengalaman personal, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami gejala kebudayaan yang lebih luas (Ellis et al., 2011; Koopman et al., 2020).

Data utama penelitian ini berasal dari catatan lapangan penulis sebagai peserta Focus Group Discussion “Peta Jalan Ekosistem Musik Indonesia Timur dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada Selasa, 27 Januari 2026, pukul 15.00–17.00 WIB, di Gedung A Lantai 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Forum ini dipilih sebagai medan utama penelitian karena di dalamnya berlangsung percakapan langsung antara pelaku musik Indonesia Timur, komunitas kreatif, aktor pemerintah, dan jejaring pemangku kepentingan mengenai arah penguatan ekosistem musik Indonesia Timur. Dalam forum tersebut, Timurnesia dibicarakan tidak hanya sebagai penamaan genre, tetapi sebagai wadah, ruang bersama, dan komunitas kultural yang dapat menampung keragaman ekspresi musik dari kawasan Indonesia Timur.

Posisi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai peserta FGD sekaligus pengamat partisipatif. Posisi ini memberi akses langsung kepada penulis untuk mencatat suasana forum, alur percakapan, usulan nama Timurnesia, respons aktor pemerintah, serta dinamika pertukaran gagasan di antara para peserta. Namun, kedekatan penulis dengan medan penelitian juga membawa konsekuensi metodologis. Karena itu, penelitian ini menempatkan reflektivitas sebagai bagian penting dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penulis secara sadar membedakan antara catatan lapangan, ingatan personal, tafsir reflektif, dokumen resmi, dan data media pendukung agar pembacaan Timurnesia tidak berubah menjadi klaim subjektif yang tidak terkontrol.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan keterlibatan aktor dalam proses pembicaraan Timurnesia. Aktor mencakup unsur pemerintah, komunitas musik, musisi Indonesia Timur, jejaring kreatif, pelaku industri kreatif, dan media. Dari unsur pemerintah, perhatian diarahkan pada respons Kementerian Kebudayaan RI, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang dicatat penulis dalam forum. Dari unsur pelaku musik dan komunitas, perhatian diarahkan pada Silet Open Up sebagai pengusul nama Timurnesia, serta sejumlah musisi dan penggiat musik seperti Toton Caribo, Dody Latuharhary, Justy Aldri, Jackson Seran, Juan Reza, Wizz Baker, Ecko Show, Gilang Ramadhan, dan pelaku musik lainnya. Pemilihan aktor ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi pelaku musik Indonesia Timur, tetapi untuk menangkap proses awal terbentuknya Timurnesia sebagai gagasan kolektif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas empat kelompok. Pertama, data primer berupa catatan lapangan penulis selama mengikuti FGD. Catatan ini mencakup proses diskusi, usulan penamaan Timurnesia, respons pemerintah, suasana forum, serta arah pembicaraan mengenai penguatan ekosistem musik Indonesia Timur. Kedua, data dokumen berupa surat undangan resmi FGD dari Kementerian Kebudayaan RI yang digunakan untuk memverifikasi judul kegiatan, waktu, tempat, dan konteks penyelenggaraan forum. Ketiga, data reflektif berupa memo penulis setelah forum, yang berisi pembacaan awal terhadap makna Timurnesia, posisi para aktor, dan kemungkinan arah pengembangan ekosistem musik Indonesia Timur. Keempat, data pendukung berupa pemberitaan media daring, unggahan medsos, dan jejak digital yang digunakan secara terbatas untuk membaca bagaimana wacana Timurnesia beredar di ruang publik setelah FGD berlangsung.

Tabel 1. Korpus Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Fungsi dalam Penelitian
Data primer	Catatan lapangan penulis sebagai peserta FGD 27 Januari 2026	Menjadi dasar utama pembacaan terhadap proses pembentukan Timurnesia
Data dokumen	Surat undangan resmi FGD Kementerian Kebudayaan RI	Memverifikasi judul forum, waktu, tempat, dan konteks kegiatan
Data reflektif	Memo penulis setelah FGD	Membantu proses autoetnografi dan penafsiran awal

Data media daring	Kompas, Republika, TIMES Indonesia, Pophariini, Radar Malioboro, Tinemu, dan media terkait	Membaca sirkulasi wacana Timurnesia di ruang publik
Jejak digital	Unggahan media sosial dan dokumentasi daring tentang Timurnesia	Melihat penyebaran istilah, respons publik, dan pembingkai digital

Penting ditegaskan bahwa media daring tidak diposisikan sebagai sumber utama temuan. Media hanya digunakan sebagai korpus pendukung untuk melihat bagaimana istilah Timurnesia dibingkai dan disebarkan setelah forum berlangsung. Dengan cara ini, penelitian membedakan secara jelas antara data lapangan yang berasal dari pengalaman langsung penulis, dokumen resmi yang memverifikasi kegiatan, dan data media yang menunjukkan perluasan wacana publik. Pembedaan ini penting agar hasil penelitian tidak terbaca sebagai rangkuman pemberitaan, melainkan tetap berakar pada catatan lapangan dan refleksi penulis sebagai peserta FGD.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, pencatatan lapangan, dokumentasi dokumen resmi, penyusunan memo reflektif, dan penelusuran jejak digital. Observasi partisipan dilakukan ketika penulis mengikuti FGD dan mencatat proses percakapan yang berlangsung. Catatan lapangan tidak hanya memuat isi pembicaraan, tetapi juga konteks interaksi, penekanan gagasan, posisi aktor, dan suasana forum. Dokumen resmi digunakan untuk memastikan konteks formal kegiatan. Sementara itu, jejak digital dikumpulkan dari pemberitaan media daring dan unggahan media sosial yang memuat pembahasan tentang Timurnesia, terutama untuk melihat bagaimana istilah ini kemudian dipahami, diterima, dan diperdebatkan dalam ruang publik.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti mengenali, mengelompokkan, dan menafsirkan pola makna yang muncul dari catatan lapangan, memo reflektif, dokumen resmi, dan data media pendukung (Braun & Clarke, 2021; Nowell et al., 2017). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penulis membaca ulang catatan lapangan dan memo reflektif untuk menemukan bagian-bagian yang berhubungan dengan pembentukan Timurnesia. Kedua, penulis memberi kode awal pada data, seperti "Timurnesia sebagai wadah", "respons pemerintah", "kesetaraan ruang musik Timur", "penguatan ekosistem", "platform digital", "kedaulatan kreatif", dan "risiko berhenti sebagai nama". Ketiga, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema yang lebih besar. Dari proses ini, penelitian mengembangkan beberapa tema utama, yaitu Timurnesia sebagai rekonstruksi identitas kolektif, Timurnesia sebagai ruang konsolidasi ekosistem, peran pemerintah sebagai fasilitator, serta tantangan resiliensi digital di tengah dominasi platform dan viralitas.

Untuk menjaga ketajaman analisis, data lapangan dibaca bersama kerangka teori tentang identitas berbasis tempat, cultural branding, kedaulatan kreatif, resiliensi digital, dan Pentahelix. Identitas berbasis tempat digunakan untuk memahami Timurnesia sebagai konstruksi identitas kawasan. Cultural branding digunakan untuk membaca bagaimana nama Timurnesia dapat bekerja sebagai penanda budaya yang mudah dikenali. Kedaulatan kreatif digunakan untuk memahami kebutuhan pelaku musik Indonesia Timur dalam mengelola narasi, produksi, distribusi, monetisasi, dan masa depan ekosistemnya sendiri. Resiliensi digital digunakan untuk membaca kemampuan komunitas menghadapi tekanan platform, algoritma, dan viralitas. Sementara itu, Pentahelix digunakan untuk melihat pentingnya kerja bersama antara pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku bisnis, dan media dalam penguatan ekosistem kreatif.

Kredibilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, reflektivitas peneliti, dan member checking terbatas. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan catatan lapangan penulis, dokumen resmi FGD, memo reflektif, data media, dan jejak digital. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi tidak hanya bertumpu pada satu jenis data (Noble & Heale, 2019; Nowell et al., 2017). Reflektivitas dilakukan dengan cara menuliskan posisi penulis secara terbuka sebagai peserta FGD, sekaligus menghindari klaim yang terlalu besar, terutama terkait diplomasi budaya. Dalam penelitian ini, diplomasi budaya ditempatkan sebagai potensi yang masih membutuhkan penguatan kelembagaan, bukan sebagai capaian yang telah selesai.

Member checking dilakukan secara terbatas melalui konfirmasi informal kepada aktor yang memahami konteks pembicaraan Timurnesia. Konfirmasi ini terutama diarahkan untuk memastikan bahwa pemaknaan Timurnesia sebagai wadah, ruang bersama, dan komunitas kultural tidak menyimpang dari semangat awal diskusi. Proses ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh pandangan peserta, tetapi untuk menjaga agar interpretasi penulis tetap berada dalam koridor pengalaman empiris forum. Dengan demikian, member checking dalam penelitian ini berfungsi sebagai langkah kehati-hatian, bukan sebagai prosedur validasi yang menutup kemungkinan adanya perbedaan tafsir.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data utama berasal dari satu forum FGD dan catatan lapangan penulis, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pelaku musik Indonesia Timur secara menyeluruh. Kedua, tidak semua pernyataan dalam forum direkam secara verbatim,

sehingga beberapa bagian ditulis sebagai parafrasa berdasarkan catatan penulis. Ketiga, data media dan jejak digital hanya digunakan sebagai pendukung, bukan sebagai dasar utama temuan. Karena itu, penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai pembacaan awal terhadap proses kelahiran dan negosiasi Timurnesia dalam ruang kebijakan kebudayaan, bukan sebagai evaluasi menyeluruh atas dampak Timurnesia terhadap industri musik Indonesia Timur.

Dengan rancangan metode tersebut, penelitian ini berusaha menjaga keseimbangan antara kedekatan pengalaman dan ketelitian akademik. Autoetnografi dipakai bukan untuk mengedepankan subjektivitas penulis secara bebas, tetapi untuk membaca bagaimana sebuah istilah, wadah, dan identitas kolektif lahir dari pertemuan antara pelaku musik, komunitas, negara, dan ruang digital. Melalui cara ini, penelitian dapat menangkap proses pembentukan Timurnesia secara lebih hidup, sekaligus tetap mempertahankan batas-batas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timurnesia tidak lahir sebagai istilah yang berdiri sendiri, juga bukan sekadar nama baru yang muncul untuk mengikuti kebutuhan pasar musik digital. Berdasarkan catatan lapangan penulis sebagai peserta Focus Group Discussion “Peta Jalan Ekosistem Musik Indonesia Timur dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional”, Timurnesia muncul dari percakapan yang cukup terbuka antara pelaku musik Indonesia Timur, komunitas kreatif, jejaring industri, dan aktor pemerintah. Percakapan itu bergerak dari keresahan yang sederhana, tetapi penting: musik Indonesia Timur semakin terlihat di ruang digital, tetapi belum selalu memiliki ruang yang setara dalam kebijakan, distribusi, panggung, pengarsipan, dan penguatan ekosistem.

Dalam forum tersebut, Timurnesia dibicarakan bukan hanya sebagai nama genre. Catatan lapangan menunjukkan bahwa istilah ini lebih tepat dipahami sebagai wadah, ruang bersama, dan komunitas kultural yang menampung keragaman ekspresi musik Indonesia Timur. Dengan kata lain, Timurnesia bukan upaya menyeragamkan musik dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan wilayah Timur lainnya. Ia justru menjadi cara untuk memberi ruang bagi keragaman itu agar dapat dibicarakan sebagai kekuatan kolektif. Di titik inilah Timurnesia bekerja sebagai proses rekonstruksi identitas: bukan identitas yang selesai, tetapi identitas yang sedang dibangun, dinegosiasikan, dan diuji dalam ruang kebijakan maupun ruang digital.



Gambar 1. Dokumentasi Focus Group Discussion “Peta Jalan Ekosistem Musik Indonesia Timur dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional” Kementerian Kebudayaan RI, 27 Januari 2026.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Timurnesia sebagai Wadah dan Rekonstruksi Identitas Kolektif

Temuan pertama penelitian ini adalah bahwa Timurnesia bekerja sebagai wadah identitas kolektif. Dalam catatan lapangan penulis, istilah Timurnesia diusulkan oleh Silet Open Up, pencipta lagu “Tabola Bale”, dalam proses bertukar pikiran bersama Kementerian Kebudayaan RI. Usulan itu tidak muncul sebagai sekadar permainan nama. Ia muncul dari kebutuhan untuk memberi sebutan pada ruang bersama bagi musik Indonesia Timur yang selama ini hadir kuat, tetapi masih tersebar dalam banyak fragmen: nama daerah, komunitas, bahasa, gaya vokal, jaringan panggung, dan jalur distribusi yang berbeda-beda.

Timurnesia, dalam pengertian ini, bukanlah pagar yang membatasi. Ia lebih dekat dengan rumah bersama. Di dalamnya, musik dari berbagai wilayah Timur tetap dapat mempertahankan kekhasannya, tetapi pada saat yang sama memiliki ruang untuk saling terhubung. Cara kerja seperti ini penting, karena musik Indonesia Timur sering dikenal publik melalui peristiwa viral tertentu, bukan melalui pemahaman yang utuh

tentang ekosistemnya. Lagu yang viral dapat membawa perhatian, tetapi perhatian itu sering kali tidak cukup untuk menjelaskan akar kultural, kerja kolektif, dan kondisi sosial para pelaku musiknya.

Sebagai identitas kolektif, Timurnesia berusaha mengubah posisi musik Indonesia Timur dari kumpulan ekspresi yang terpisah menjadi percakapan kawasan. Dalam kajian identitas musikal, musik dapat menjadi penanda rasa memiliki, solidaritas, dan hubungan antara komunitas dengan ruang sosialnya (Lidskog, 2016). Hal serupa tampak dalam Timurnesia. Musik tidak hanya hadir sebagai bunyi, tetapi juga sebagai cara komunitas menyebut dirinya, menegosiasikan tempatnya, dan membangun posisi tawar di hadapan industri musik nasional.

Pembacaan ini juga berhubungan dengan konsep identitas berbasis tempat. Suatu wilayah tidak hanya dipahami sebagai lokasi geografis, tetapi sebagai ruang makna yang dibentuk oleh sejarah, simbol, praktik budaya, dan pengalaman bersama. Dalam konteks industri musik, tempat dapat menjadi sumber nilai, pembeda, sekaligus dasar pembentukan citra budaya (Adler, 2024; Castaldi & Mendonça, 2024). Timurnesia bekerja dalam logika semacam itu. Ia memberi nama pada pengalaman musikal kawasan Timur tanpa melepaskannya dari konteks sosial dan kultural yang membentuknya.

Namun, identitas kolektif semacam ini tetap perlu dibaca secara hati-hati. Indonesia Timur bukan satu suara tunggal. Di dalamnya terdapat banyak bahasa, pulau, sejarah, dan tradisi musikal. Karena itu, Timurnesia tidak boleh berkembang menjadi identitas yang menutupi keragaman internal. Ia harus dijaga sebagai ruang terbuka, bukan sebagai label yang memusatkan perhatian hanya pada nama-nama yang sedang populer. Jika tidak, Timurnesia berisiko menciptakan pusat baru di dalam kawasan Timur sendiri.

Respons Pemerintah dan Penguatan Ekosistem Musik Indonesia Timur

Temuan kedua berkaitan dengan respons pemerintah. Dalam catatan lapangan penulis, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menanggapi perkembangan musik Indonesia Timur sebagai fenomena yang layak diapresiasi. Ia menyinggung karya-karya kolaboratif generasi muda, termasuk “Tabola Bale”, sebagai bagian dari gejala musikal yang menarik perhatian publik. Dalam forum tersebut, Fadli Zon menyatakan:

“Banyak musik Indonesia Timur yang viral, seperti Tabola Bale. Ini menjadi fenomena menarik yang patut kita apresiasi bersama seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Kebudayaan sebagai fasilitator siap untuk mendorong dan memfasilitasi teman-teman semua dalam menciptakan ekosistem musik beserta objek pemajuan kebudayaan lainnya.”

Pernyataan ini penting karena memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat musik Indonesia Timur sebagai peristiwa hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan. Kata “fasilitator” menjadi penting dalam konteks ini. Pemerintah tidak ditempatkan sebagai pemilik suara komunitas, tetapi sebagai pihak yang dapat membuka ruang, menyediakan dukungan, dan membantu membangun ekosistem. Dengan demikian, Timurnesia tidak hanya bergerak dalam ranah simbolik, tetapi juga mulai masuk ke dalam percakapan tentang kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan Pentahelix, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku bisnis, dan media dalam membangun ekosistem kreatif. Dalam model ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula komunitas tidak dapat dibiarkan berjuang sendiri. Kolaborasi lintas aktor menjadi syarat penting agar gagasan kebudayaan dapat bergerak menjadi program yang lebih berkelanjutan (Sudiana et al., 2020; Sukarno et al., 2020). Kajian tentang ekonomi kreatif berbasis lokal juga menunjukkan bahwa keterhubungan antaraktor sangat menentukan daya hidup sebuah ekosistem kreatif (Atmojo et al., 2023; Prajanti et al., 2023). Berdasarkan catatan lapangan dan pembacaan data pendukung, peran aktor dalam penguatan Timurnesia dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 2. Peran Aktor Pentahelix dalam Penguatan Ekosistem Timurnesia

Aktor	Peran dalam Ekosistem Timurnesia	Indikasi Temuan	Implikasi Strategis
Pemerintah	Fasilitasi kebijakan, dukungan kelembagaan, dan pemajuan kebudayaan	Kementerian Kebudayaan memfasilitasi FGD dan menyatakan kesiapan mendukung penguatan ekosistem	Perlu program lanjutan yang menyentuh pelatihan, distribusi, arsip, hak cipta, dan jaringan pertunjukan
Komunitas/Musisi	Pengusul gagasan, penjaga pengalaman musikal, dan pembawa aspirasi kawasan	Silet Open Up Timurnesia sebagai wadah bersama; musisi Timur hadir sebagai suara kolektif	Timurnesia perlu tetap berakar pada komunitas, bukan hanya pada narasi media atau industri
Akademisi/Peneliti	Dokumentasi, refleksi kritis, dan penyusunan pengetahuan	Penulis mencatat dan menganalisis proses pembentukan Timurnesia melalui autoetnografi	Perlu riset lanjutan tentang dampak Timurnesia terhadap ekosistem musik Indonesia Timur

Pelaku Industri Kreatif	Produksi, distribusi, monetisasi, dan jejaring pasar	Forum membuka pembicaraan tentang kebutuhan penguatan ekosistem, bukan hanya penamaan	Perlu model distribusi dan monetisasi yang lebih adil bagi musisi kawasan Timur
Media	Perluasan wacana publik dan pembingkaihan isu	Media daring memperluas pembicaraan tentang Timurnesia setelah FGD	Media perlu menjaga kompleksitas Timurnesia agar tidak disederhanakan hanya sebagai genre pasar

Tabel ini memperlihatkan bahwa Timurnesia tidak mungkin dibangun oleh satu aktor saja. Kekuatan Timurnesia justru terletak pada kemampuan mempertemukan energi komunitas dengan dukungan kebijakan, pembacaan akademik, kemampuan industri, dan sirkulasi media. Namun, kerja Pentahelix ini harus dijaga agar tidak berhenti pada forum. Jika tidak diterjemahkan ke dalam program yang konkret, Timurnesia dapat menjadi nama yang ramai dibicarakan, tetapi tidak cukup membantu pelaku musik di lapangan.

Kedaulatan Kreatif: Dari Viralitas Menuju Kendali Ekosistem

Temuan ketiga menunjukkan bahwa Timurnesia membuka percakapan tentang kedaulatan kreatif. Dalam artikel ini, kedaulatan kreatif dipahami sebagai kemampuan pelaku musik Indonesia Timur untuk mengelola narasi, produksi, distribusi, monetisasi, arsip, hak cipta, dan masa depan ekosistemnya sendiri. Kedaulatan ini tidak sama dengan viralitas. Sebuah lagu dapat viral, tetapi pelakunya belum tentu memiliki kendali atas distribusi, manfaat ekonomi, atau narasi yang melekat pada karya tersebut.

Dalam FGD, popularitas lagu-lagu dari Indonesia Timur menjadi salah satu pintu masuk pembicaraan. Akan tetapi, pembicaraan tidak berhenti pada kebanggaan karena ada karya yang viral. Justru dari titik itu muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang terjadi setelah viral? Apakah musisi memiliki akses pada distribusi yang adil? Apakah hak cipta terlindungi? Apakah ada manajemen yang cukup kuat? Apakah ada arsip yang baik? Apakah negara, industri, dan komunitas memiliki peta jalan yang jelas untuk menjaga keberlanjutan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa Timurnesia bukan hanya persoalan nama. Ia menyangkut tata kelola. Dalam ekosistem streaming, persoalan keadilan bagi musisi menjadi isu yang terus dibicarakan. Platform dapat memperluas jangkauan, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan ketimpangan baru dalam distribusi pendapatan, sistem rekomendasi, dan visibilitas karya (Ferraro et al., 2021; Hesmondhalgh, 2021). Bahkan, sistem platform sering kali membuat musisi harus bekerja mengikuti logika promosi yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan (Dinnissen & Bauer, 2022, 2023).

Dengan demikian, kedaulatan kreatif Timurnesia dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, kemampuan pelaku musik Indonesia Timur membangun narasi sendiri tentang dirinya. Kedua, kemampuan mengelola produksi dan kolaborasi lintas wilayah tanpa kehilangan akar kultural. Ketiga, kemampuan memperkuat distribusi digital dan pertunjukan secara lebih adil. Keempat, kemampuan melindungi hak cipta dan nilai ekonomi karya. Kelima, kemampuan membangun arsip, festival, pusat talenta, dan program pelatihan yang berpihak pada pelaku musik lokal.

Di sinilah letak perbedaan antara viralitas dan ekosistem. Viralitas dapat membuka pintu, tetapi ekosistem menentukan apakah pintu itu menjadi jalan panjang atau hanya momen sesaat. Timurnesia menjadi penting karena mencoba menggeser pembicaraan dari “musik Timur sedang ramai” menjadi “bagaimana musik Timur dapat tumbuh dengan infrastruktur yang lebih kuat”. Pergeseran ini sejalan dengan kritik terhadap platformisasi produksi budaya, di mana karya tidak hanya diproduksi untuk publik, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan sistem distribusi dan komodifikasi platform (Nieborg & Poell, 2018; Vonderau, 2019).

Resiliensi Digital dalam Rimba Algoritmik

Temuan keempat berkaitan dengan resiliensi digital. Dalam artikel ini, resiliensi digital tidak sekadar berarti kemampuan hadir di media sosial atau platform streaming. Resiliensi digital berarti kemampuan komunitas musik untuk bertahan, beradaptasi, dan membangun strategi di tengah sistem digital yang bergerak cepat. Musik Indonesia Timur memang semakin terlihat, tetapi keterlihatan itu berada dalam medan yang tidak sederhana: algoritma, playlist, tren, konten pendek, dan metrik konsumsi ikut menentukan umur perhatian publik. Istilah “rimba algoritmik” digunakan untuk menjelaskan medan tersebut. Di dalam rimba ini, karya musik dapat naik cepat karena viral, tetapi juga dapat tenggelam dengan cepat ketika algoritma, tren, atau perhatian publik bergeser. Platform digital tidak netral karena ia mengatur cara karya ditemukan, dipromosikan, dan direkomendasikan kepada pendengar (Morris, 2020; Prey, 2018; Siles et al., 2020). Dalam

platform streaming, kuasa kurasi juga tidak hanya berada pada manusia, tetapi bercampur dengan sistem algoritmik dan keputusan editorial platform (Bonini & Gandini, 2019; Prey, 2020).

Bagi musik Indonesia Timur, situasi ini menghadirkan peluang sekaligus risiko. Peluangnya adalah karya dapat menembus batas wilayah tanpa harus menunggu legitimasi pusat. Risiko utamanya adalah ketergantungan pada momen viral. Jika tidak ada ekosistem yang mendukung, musik Indonesia Timur dapat dikenal luas tetapi tidak memiliki basis kelembagaan yang cukup untuk mempertahankan keberlanjutan. Dalam konteks ini, Timurnesia dapat dibaca sebagai strategi awal untuk mengubah perhatian digital menjadi konsolidasi ekosistem. Resiliensi digital Timurnesia dapat diwujudkan melalui beberapa hal. Pertama, literasi platform agar pelaku musik memahami cara kerja distribusi digital. Kedua, penguatan arsip agar karya dan sejarah musik Timur tidak hilang setelah tren berlalu. Ketiga, kurasi yang lebih berpihak pada keragaman wilayah, bukan hanya pada nama yang sedang populer. Keempat, perlindungan hak cipta dan kontrak kerja yang lebih adil. Kelima, jejaring pertunjukan yang menghubungkan ruang digital dengan panggung fisik. Dalam konteks ini, resiliensi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang kemampuan komunitas membangun daya tahan sosial, ekonomi, dan kultural (Udwan et al., 2020).

Kajian tentang rekomendasi musik digital juga menunjukkan bahwa algoritma dapat membentuk pengalaman mendengar sekaligus membatasi keragaman yang muncul ke permukaan (Werner, 2020). Karena itu, Timurnesia perlu mendorong sistem kurasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada platform besar. Komunitas, festival, radio, media lokal, arsip digital, kampus seni, dan ruang kebudayaan dapat menjadi simpul alternatif agar musik Indonesia Timur tidak hanya hidup dalam logika algoritma, tetapi juga dalam jaringan sosial dan kultural yang lebih kuat.

Data Media sebagai Korpus Pendukung Wacana Publik

Selain catatan lapangan, penelitian ini juga membaca media daring dan jejak digital sebagai korpus pendukung. Data media menunjukkan bahwa setelah FGD berlangsung, Timurnesia mulai beredar dalam ruang publik sebagai istilah yang dikaitkan dengan musik Indonesia Timur, identitas kawasan, penguatan ekosistem, dan peluang menuju panggung yang lebih luas. Namun, dalam artikel ini, media tidak ditempatkan sebagai data utama. Media hanya digunakan untuk melihat bagaimana wacana yang muncul dalam forum kemudian disebar, dibingkai, dan dipahami oleh publik.

Pembedaan ini penting karena beberapa media cenderung menyebut Timurnesia sebagai genre baru. Sebutan itu memang mudah dipahami pembaca umum, tetapi catatan lapangan penulis menunjukkan bahwa makna Timurnesia lebih luas. Ia bukan hanya genre, tetapi wadah. Ia bukan hanya kategori musik, tetapi ruang komunitas. Ia bukan hanya nama untuk promosi, tetapi cara menyusun percakapan tentang ekosistem musik Indonesia Timur. Perbedaan antara bingkai media dan catatan lapangan ini menjadi temuan penting, karena memperlihatkan bagaimana sebuah gagasan dapat mengalami penyederhanaan ketika masuk ke ruang publik. Media daring seperti Kompas, Republika, TIMES Indonesia, Pophariini, Radar Malioboro, dan Tinemu digunakan dalam penelitian ini sebagai korpus pendukung. Data tersebut membantu melihat bahwa Timurnesia tidak berhenti di ruang FGD, tetapi mulai beredar dalam percakapan publik. Akan tetapi, hasil utama tetap dibangun dari catatan lapangan penulis, dokumen resmi forum, dan refleksi autoetnografis. Dengan begitu, artikel ini tidak menjadi rangkuman pemberitaan, melainkan pembacaan akademik atas proses kelahiran Timurnesia.

Potensi Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas

Temuan kelima menunjukkan bahwa Timurnesia memiliki potensi sebagai jalan diplomasi budaya berbasis komunitas. Namun, klaim ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Berdasarkan data yang tersedia, Timurnesia belum dapat disebut sebagai instrumen diplomasi budaya yang sudah mapan. Yang lebih tepat adalah melihatnya sebagai potensi yang sedang dibangun. Potensi itu muncul karena musik Indonesia Timur membawa kekayaan bunyi, bahasa, ritme, tubuh, dan cerita yang dapat berbicara melampaui batas wilayah.

Sebagai potensi diplomasi budaya, Timurnesia dapat membuka peluang bagi musik Indonesia Timur untuk hadir dalam festival, kolaborasi lintas negara, pertukaran budaya, dan jejaring kreatif kawasan. Namun, diplomasi budaya semacam ini tidak boleh membuat komunitas hanya menjadi objek representasi. Justru yang penting adalah memastikan pelaku musik Indonesia Timur tetap menjadi subjek yang berbicara atas dirinya sendiri. Negara dapat hadir sebagai fasilitator, tetapi suara utama harus tetap berasal dari komunitas.

Di sinilah Timurnesia memiliki posisi yang menarik. Ia dapat menghubungkan komunitas dengan kebijakan, ruang digital dengan panggung fisik, serta identitas lokal dengan percakapan nasional dan internasional. Akan tetapi, semua itu baru dapat terjadi jika Timurnesia dikelola secara berkelanjutan. Tanpa

sistem kurasi, dokumentasi, produksi, dan dukungan kelembagaan, diplomasi budaya hanya akan menjadi klaim yang terlalu besar. Karena itu, artikel ini menempatkan diplomasi budaya sebagai kemungkinan, bukan sebagai capaian akhir.

Pembacaan Kritis: Risiko dan Tantangan Implementasi

Meskipun Timurnesia memiliki potensi, hasil penelitian juga memperlihatkan sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah risiko penyederhanaan makna. Ketika Timurnesia masuk ke ruang media dan industri, ia dapat dipahami hanya sebagai genre. Padahal, dalam catatan lapangan penulis, Timurnesia lebih dekat dengan wadah dan ruang komunitas. Penyederhanaan ini perlu diwaspadai agar Timurnesia tidak berubah menjadi label pasar yang kehilangan kedalaman sosialnya.

Tantangan kedua adalah risiko berhenti sebagai nama. Penamaan memang penting, karena nama memberi ruang bagi pengenalan dan konsolidasi. Namun, nama tidak otomatis membangun ekosistem. Timurnesia membutuhkan tindak lanjut berupa program pengembangan talenta, pelatihan manajemen musik, distribusi digital, pengarsipan, festival, perlindungan hak cipta, pendampingan komunitas, dan jejaring pertunjukan. Tanpa langkah konkret, Timurnesia dapat menjadi istilah yang ramai dibicarakan tetapi tidak cukup berdampak pada kehidupan pelaku musik.

Tantangan ketiga adalah risiko ketimpangan internal. Indonesia Timur bukan wilayah yang homogen. Ada banyak pulau, bahasa, komunitas, genre, dan sejarah lokal yang berbeda. Jika Timurnesia hanya menonjolkan beberapa nama populer, maka ia berisiko mengganti satu bentuk sentralisasi dengan sentralisasi baru. Karena itu, Timurnesia harus dikelola sebagai ruang inklusif yang memberi tempat bagi keragaman, termasuk bagi komunitas kecil yang belum memiliki akses besar ke platform digital.

Tantangan keempat adalah keberlanjutan dukungan negara. Pernyataan pemerintah dalam FGD menunjukkan niat fasilitasi yang penting, tetapi ekosistem membutuhkan kebijakan yang konsisten. Dukungan tidak cukup berhenti pada forum, apresiasi, atau pemberitaan. Ia perlu diterjemahkan ke dalam program, anggaran, jejaring kerja, dan mekanisme evaluasi. Dalam kerangka Pentahelix, pemerintah memang aktor penting, tetapi keberhasilan Timurnesia tetap bergantung pada kerja bersama seluruh aktor ekosistem.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Timurnesia adalah proses, bukan produk akhir. Ia lahir dari pengalaman lapangan, percakapan komunitas, respons pemerintah, dan sirkulasi wacana digital. Nilainya tidak hanya terletak pada nama, tetapi pada ruang yang dibukanya: ruang untuk menyebut musik Indonesia Timur secara lebih setara, ruang untuk membangun ekosistem, dan ruang untuk menegosiasikan masa depan musik di tengah rimba algoritmik. Timurnesia belum menyelesaikan seluruh persoalan musik Indonesia Timur, tetapi ia memberi titik mulai yang penting untuk membicarakan kembali hubungan antara identitas, kebijakan, platform digital, dan kedaulatan kreatif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Timurnesia tidak cukup dipahami sebagai nama genre baru atau istilah populer yang muncul setelah musik Indonesia Timur ramai dibicarakan di ruang digital. Berdasarkan catatan lapangan penulis sebagai peserta FGD "Peta Jalan Ekosistem Musik Indonesia Timur dalam Kebijakan Kebudayaan Nasional", Timurnesia lebih tepat dibaca sebagai wadah, ruang bersama, dan komunitas kultural yang berusaha menampung keragaman ekspresi musik dari kawasan Indonesia Timur. Ia lahir dari kebutuhan untuk memberi ruang representasi yang lebih setara bagi pelaku musik Timur, terutama dalam ekosistem musik nasional yang masih kuat dipengaruhi oleh sentralisasi industri dan logika platform digital.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Timurnesia bekerja sebagai proses rekonstruksi identitas kolektif. Ia tidak menyeragamkan musik Indonesia Timur, tetapi menyediakan bahasa bersama agar keragaman musik dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan wilayah Timur lainnya dapat dibicarakan sebagai kekuatan kawasan. Usulan Timurnesia oleh Silet Open Up dalam forum menjadi penting karena menunjukkan bahwa gagasan ini muncul dari percakapan pelaku musik sendiri, bukan semata-mata dari lembaga, industri, atau media. Dengan demikian, Timurnesia memiliki akar komunitas yang perlu terus dijaga agar tidak berubah menjadi label pasar yang jauh dari semangat awalnya.

Respons pemerintah dalam FGD juga memperlihatkan bahwa musik Indonesia Timur mulai memperoleh perhatian dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Pernyataan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon tentang pentingnya mengapresiasi fenomena musik Indonesia Timur dan kesiapan kementerian untuk memfasilitasi penguatan ekosistem menunjukkan adanya peluang hubungan antara aspirasi komunitas dan kebijakan negara. Namun, peluang ini tetap perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang lebih konkret. Fasilitasi negara tidak cukup berhenti pada forum dan apresiasi, tetapi perlu bergerak ke arah program

pengembangan talenta, penguatan distribusi, perlindungan hak cipta, pengarsipan, kurasi, festival, serta jaringan pertunjukan yang berkelanjutan.

Dari sisi kedaulatan kreatif, Timurnesia membuka percakapan penting tentang perlunya pelaku musik Indonesia Timur memiliki kendali yang lebih besar atas narasi, produksi, distribusi, monetisasi, arsip, dan masa depan ekosistemnya sendiri. Viralitas digital memang dapat membuat musik Timur dikenal lebih luas, tetapi viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan. Tanpa dukungan kelembagaan, literasi platform, manajemen hak cipta, dan akses distribusi yang adil, musik Indonesia Timur berisiko hanya menjadi fenomena sesaat dalam rimba algoritmik. Karena itu, Timurnesia perlu dipahami sebagai langkah awal untuk membangun resiliensi digital, bukan sebagai jawaban final atas seluruh persoalan ekosistem musik Timur.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan Timurnesia membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku industri, dan media memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah dapat hadir sebagai fasilitator kebijakan; komunitas dan musisi menjadi sumber utama gagasan serta praktik kreatif; akademisi membantu dokumentasi dan pembacaan kritis; pelaku industri memperkuat produksi, distribusi, dan monetisasi; sedangkan media membantu memperluas sirkulasi wacana. Kerja lintas sektor ini perlu dijaga agar tidak berhenti sebagai seremoni atau penamaan, melainkan benar-benar menjadi ekosistem yang memberi manfaat bagi pelaku musik Indonesia Timur.

Dengan demikian, Timurnesia memiliki potensi sebagai model penguatan identitas kawasan, resiliensi digital, dan diplomasi budaya berbasis komunitas. Namun, potensi tersebut masih berada pada tahap awal institusionalisasi. Karena itu, klaim tentang Timurnesia sebagai instrumen diplomasi budaya perlu ditempatkan secara hati-hati. Pada tahap ini, Timurnesia lebih tepat dilihat sebagai kemungkinan yang sedang dibangun, bukan sebagai praktik diplomasi budaya yang sudah mapan. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya membuka ruang pertemuan antara aspirasi komunitas, perhatian negara, dan sirkulasi publik di ruang digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data utama penelitian berasal dari satu forum FGD dan catatan lapangan penulis, sehingga hasilnya belum dapat mewakili seluruh pengalaman pelaku musik Indonesia Timur. Kedua, tidak semua pernyataan peserta forum direkam secara verbatim, sehingga sebagian data ditulis sebagai parafrasa berdasarkan catatan reflektif penulis. Ketiga, data media dan jejak digital hanya digunakan sebagai korpus pendukung untuk membaca sirkulasi wacana publik, bukan sebagai dasar utama temuan. Dengan keterbatasan tersebut, artikel ini lebih tepat dipahami sebagai pembacaan awal terhadap proses kelahiran dan negosiasi Timurnesia dalam ruang kebijakan kebudayaan.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan data yang lebih luas. Kajian berikutnya dapat melibatkan wawancara mendalam dengan musisi Indonesia Timur, pengelola platform digital, kurator festival, pelaku industri musik, pemerintah daerah, komunitas musik lokal, dan pendengar. Penelitian berikutnya juga dapat menelaah dampak Timurnesia terhadap distribusi digital, monetisasi, perlindungan hak cipta, festival musik, pengarsipan, serta penerimaan komunitas di berbagai wilayah Indonesia Timur. Dengan cara itu, Timurnesia tidak hanya dibaca sebagai gagasan awal, tetapi juga dapat dievaluasi sebagai praktik ekosistem yang benar-benar bekerja bagi keberlanjutan musik Indonesia Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas kepercayaan dan kesempatan strategis yang diberikan untuk terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan Peta Jalan Musik Indonesia Timur. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pimpinan dan rekan-rekan sejawat di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua serta Indonesia Creative Cities Network (ICCN) yang telah memfasilitasi ruang dialog serta penyediaan data primer yang sangat krusial bagi kelancaran penelitian ini. Penulis juga mendedikasikan apresiasi ini kepada komunitas Timurnesia, para musisi, dan pegiat seni di wilayah Timur Indonesia yang telah menjadi sumber inspirasi utama sekaligus mitra diskusi dalam upaya memperjuangkan kedaulatan kreatif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P. (2024). Brand on the run: Place brands as judgement devices and sources of local advantage in the music industry. *Regional Studies*, 58(10), 1904–1920. <https://doi.org/10.1080/00343404.2024.2306326>
- Aguiar, L., & Waldfoegel, J. (2021). Platforms, power, and promotion: Evidence from Spotify playlists. *The Journal of Industrial Economics*, 69(3), 653–691. <https://doi.org/10.1111/joie.12263>

- Atmojo, B. T., Siswidiyanto, S., & Danar, O. R. (2023). Penta-helix collaboration in the development of Papua Province's creative economy. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 69–84. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1110>
- Bonini, T., & Gandini, A. (2019). "First week is editorial, second week is algorithmic": Platform gatekeepers and the platformization of music curation. *Social Media + Society*, 5(4), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305119880006>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in reflexive thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Castaldi, C., & Mendonça, S. (2024). Places as brands: Charting the value of place-based intangibles. *Regional Studies*, 58(10), 1781–1791. <https://doi.org/10.1080/00343404.2024.2355280>
- de Jong, M., & Lu, H. (2022). City branding, regional identity and public space: What historical and cultural symbols in urban architecture reveal. *Global Public Policy and Governance*, 2(2), 203–231. <https://doi.org/10.1007/s43508-022-00043-0>
- Dinnissen, K., & Bauer, C. (2022). Fairness in music recommender systems: A stakeholder-centered mini review. *Frontiers in Big Data*, 5, Article 913608. <https://doi.org/10.3389/fdata.2022.913608>
- Dinnissen, K., & Bauer, C. (2023). Amplifying artists' voices: Item provider perspectives on influence and fairness of music streaming platforms. In *Proceedings of the 31st ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization* (pp. 238–249). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3565472.3592960>
- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 12(1), Article 10. <https://doi.org/10.17169/fqs-12.1.1589>
- Ferraro, A., Serra, X., & Bauer, C. (2021). What is fair? Exploring the artists' perspective on the fairness of music streaming platforms. In C. Ardito, R. Lanzilotti, A. Malizia, H. Petrie, A. Piccinno, G. Desolda, & K. Inkpen (Eds.), *Human-computer interaction - INTERACT 2021* (pp. 562–584). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85616-8_33
- Hesmondhalgh, D. (2021). Is music streaming bad for musicians? Problems of evidence and argument. *New Media & Society*, 23(12), 3593–3615. <https://doi.org/10.1177/1461444820953541>
- Hesmondhalgh, D., & Meier, L. M. (2018). What the digitalisation of music tells us about capitalism, culture and the power of the information technology sector. *Information, Communication & Society*, 21(11), 1555–1570. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1340498>
- Koopman, W. J., Watling, C. J., & LaDonna, K. A. (2020). Autoethnography as a strategy for engaging in reflexivity. *Global Qualitative Nursing Research*, 7, 1–9. <https://doi.org/10.1177/2333393620970508>
- Lidskog, R. (2016). The role of music in ethnic identity formation in diaspora: A research review. *International Social Science Journal*, 66(219–220), 23–38. <https://doi.org/10.1111/issj.12091>
- Morris, J. W. (2020). Music platforms and the optimization of culture. *Social Media + Society*, 6(3), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2056305120940690>
- Nieborg, D. B., & Poell, T. (2018). The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. *New Media & Society*, 20(11), 4275–4292. <https://doi.org/10.1177/1461444818769694>
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Prajanti, S. D. W., Daud, D., Amin, S., Subiyanto, & Adzim, F. (2023). A sustainable creative economy development model using a penta-helix approach based on local wisdom in Magelang City, Indonesia. *Visions for Sustainability*, 20, 239–275. <https://doi.org/10.13135/2384-8677/7917>
- Prey, R. (2018). Nothing personal: Algorithmic individuation on music streaming platforms. *Media, Culture & Society*, 40(7), 1086–1100. <https://doi.org/10.1177/0163443717745147>
- Prey, R. (2020). Locating power in platformization: Music streaming playlists and curatorial power. *Social Media + Society*, 6(3), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305120933291>
- Resmadi, I. (2024). The impact of platformization on streaming music governance in Indonesia and the resistance by local indie musicians. *Jurnal Sosioteknologi*, 23(3), 358–373. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2024.23.3.5>

- Resmadi, I., & Baulch, E. (2024). Indonesian critiques of the new musical system. *Continuum*, 38(5), 595–609. <https://doi.org/10.1080/10304312.2024.2393878>
- Siles, I., Segura-Castillo, A., Solís, R., & Sancho, M. (2020). Folk theories of algorithmic recommendations on Spotify: Enacting data assemblages in the global South. *Big Data & Society*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/2053951720923377>
- Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The development and validation of the Penta Helix construct. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>
- Sukarno, G., Rasyidah, R., & Saadah, K. (2020). Improve creative industry competitiveness: Penta Helix and human capital in digital era. In *Proceedings of the 2nd International Media Conference 2019* (pp. 157–170). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200325.014>
- Udwan, G., Leurs, K., & Alencar, A. (2020). Digital resilience tactics of Syrian refugees in the Netherlands: Social media for social support, health, and identity. *Social Media + Society*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305120915587>
- Vonderau, P. (2019). The Spotify effect: Digital distribution and financial growth. *Television & New Media*, 20(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/1527476417741200>
- Werner, A. (2020). Organizing music, organizing gender: Algorithmic culture and Spotify recommendations. *Popular Communication*, 18(1), 78–90. <https://doi.org/10.1080/15405702.2020.1715980>